

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) ATAU

E-GOVERNMENT DI INDONESIA

**Karmanis¹, Ainun Ganisia², University of 17 August 1945 Semarang,
Indonesia**

PUBLIC POLICY INTERNATIONAL CONFERENCE (PPIC)

**Shaping Indonesia's Future: Empowering Human Resources to Create
Quality Public Policies and Welcoming All Parties**

UNTAG Semarang, Indonesia

ABSTRAK

Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang SPBE, atas kerja sama berbagai pihak, Indonesia telah menunjukkan geliat perubahan kearah yang lebih baik. Diharapkan, seluruh aspek bangsa terus mampu berkomitmen penuh untuk mendukung pemerintahan digital dan pembangunan berkelanjutan dalam rangka memenangkan persaingan global. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kebijakan pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government di Indonesia ? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik analisa data yang digunakan adalah yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah: United Nations (UN) e-Government Survey 2020 telah menempatkan Indonesia pada peringkat 88 atas pengembangan dan pelaksanaan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Hasil di tahun 2020, menunjukkan kenaikan 19 peringkat dibandingkan tahun 2018 yang berada di urutan 107 dan urutan 116 di tahun 2016. Secara keseluruhan, Indonesia mencetak skor 0.6612 di dalam grup High e-Government Development Index (EGDI) di UN e-Government

Survey 2020 sehingga berhasil menempatkan Indonesia masuk 100 besar peringkat dunia di posisi 88 dari 193 negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempredikatkan negara-negara yang mendapatkan poin lebih dari 0.75 sebagai Very High EGDI, untuk poin 0.50 sampai 0.75 sebagai High EGDI, poin 0.25 sampai 0.50 sebagai Middle EGDI, dan kurang dari 0.25 sebagai Low EGDI. Negara-negara tersebut mendapatkan peringkat untuk 193 negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Terdapat tiga dimensi ukuran kinerja yang ada dalam EGDI, antara lain indeks pelayanan daring atau online service index (OSI), indeks infrastruktur telekomunikasi atau telecommunication infrastructure index (TII), dan indeks sumber daya manusia atau human capital index (HCI). Dalam masing-masing penilaian ukuran kinerja tersebut, Indonesia mencatatkan skor yang cukup baik antara lain skor 0.6824 untuk OSI, skor 0.5669 untuk TII, dan skor 0.7342 untuk HCI. Ketiga komponen tersebut sudah berada di atas skor rata-rata dunia, meskipun jika dilihat dari grup Regional Asia dan Sub-Regional Asia Tenggara, Indonesia masih berada di bawah rata-rata regional pada skor indeks infrastruktur telekomunikasi atau TII. Indonesia juga patut berbangga, karena dalam rilis yang dikeluarkan oleh EGDI, Indonesia berhasil melompat naik 35 peringkat pada e-Participation Index tahun 2020, dari yang sebelumnya peringkat 92 pada tahun 2018, menjadi peringkat 53 pada tahun 2020 dengan skor 0.7500. Skor ini sudah di atas rata-rata dunia dengan skor 0.5677, di atas rata-rata Regional Asia dengan skor 0.6294, dan juga di atas rata-rata Regional Asia Tenggara dengan skor 0.6126. Hal ini membuat Indonesia naik predikat dari yang sebelumnya termasuk dalam grup High e-Participation Index menjadi grup Very High e-Participation Index.

Kata Kunci : Kebijakan, Pengembangan, e-government.

ABSTRACT

Since the issuance of Presidential Regulation Number 95 of 2018 regarding SPBE, for the cooperation of various parties, Indonesia has shown stretching changes for the better. It is hoped that all aspects of the nation will continue to be fully committed to supporting digital governance and sustainable development in order to win global competition. The problems in this study are: How is the policy of developing an Electronic-Based Government System (SPBE) or e-government in Indonesia? This study uses a qualitative method. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study are: The United Nations (UN) e-Government Survey 2020 has placed Indonesia on the 88th rank for the development and implementation of e-government or an electronic-based government system (SPBE). The results in 2020, showed an increase of 19 ranks compared to 2018 which was at 107th and 116th in 2016. Overall, Indonesia scored a score of 0.6612 in the High e-Government Development Index (EGDI) group in the UN e-Government Survey 2020, successfully placing Indonesia in the top 100 world rankings at position 88 out of 193 countries. The United Nations (UN) predicts countries with more than 0.75 points as Very High EGDI, 0.50 to 0.75 points as High EGDI, 0.25 to 0.50 points as Middle EGDI, and less than 0.25 as Low EGDI. These countries are ranked for 193 member states of the United Nations (UN). There are three dimensions of performance measures in the EGDI, including the online service index (OSI), the telecommunication infrastructure index (TII), and the human capital index (HCI). In each of these performance measures, Indonesia recorded a fairly good score, including a score of 0.6824 for OSI, a score of 0.5669 for TII, and a score of 0.7342 for HCI. These three components are already above the world average score, although when viewed from the Regional Asia and Sub-Regional Southeast Asia group, Indonesia is still below the regional average on the telecommunications infrastructure index score or TII. Indonesia should also be proud, because in a release issued by EGDI, Indonesia managed to jump up 35 ranks on the e-Participation Index in 2020, from previously ranked 92 in 2018, to rank 53 in 2020 with a score of 0.7500. This score is already above the world average with a score of 0.5677, above the Asian Regional average with a score of 0.6294, and also above the Southeast Asia Regional average with a score of

0.6126. This has made Indonesia rise from being included in the High e-Participation Index group to the Very High e-Participation Index group.

Keywords: Policy, Development, e-government.

Introduction:

Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomer 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), atas kerja sama berbagai pihak, Indonesia telah menunjukkan geliat perubahan kearah yang lebih baik. Diharapkan, seluruh aspek bangsa terus mampu berkomitmen penuh untuk mendukung pemerintahan digital dan pembangunan berkelanjutan dalam rangka memenangkan persaingan global.

Since the issuance of Presidential Regulation No. 95 of 2018 concerning the Electronic-Based Government System, with the cooperation of various parties, Indonesia has shown a stretch of change for the better. It is hoped that all aspects of the nation will continue to be fully committed to supporting digital governance and sustainable development in order to win global competition.

B. Rumusan Masalah (Formulation of the problem)

Bagaimana kebijakan pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government di Indonesia ?

What is the policy for developing an Electronic-Based Government System or e-government in Indonesia?

C. Tujuan Penelitian (Research Purposes)

Mendiskripsikan dan Menganalisis kebijakan pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government di Indonesia ?

To describe and analyze policies on the development of an Electronic-Based Government System (e-government) in Indonesia?

D. Metode Penelitian (Research Methods)

Metode penelitian kualitatif pada penelitian naturalistic. Teknik analisa data yang digunakan adalah yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Qualitative research methods in naturalistic research. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion drawing

E. Hasil Penelitian (Research Result) :

United Nations (UN) e-Government Survey 2020 telah menempatkan Indonesia pada peringkat 88 atas pengembangan dan pelaksanaan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Hasil di tahun 2020, menunjukkan kenaikan 19 peringkat dibandingkan tahun 2018 yang berada di urutan 107 dan urutan 116 di tahun 2016.

The United Nations (UN) e-Government Survey 2020 has ranked Indonesia 88th for the development and implementation of e-government or an electronic-based government system. The results in 2020, showed an increase of 19 ranks compared to 2018 which was at 107th and 116th in 2016.

Secara keseluruhan, Indonesia mencetak skor 0.6612 di dalam grup High e-Government Development Index (EGDI) di United Nations (UN) e-Government Survey 2020 sehingga berhasil menempatkan Indonesia masuk 100 besar peringkat dunia di posisi 88 dari 193 negara.

Overall, Indonesia scored a score of 0.6612 in the High e-Government Development Index (EGDI) group in the United Nations (UN) e-Government Survey 2020, successfully placing Indonesia in the top 100 world rankings at position 88 out of 193 countries.

**Peringkat e-Government
Indonesia di Dunia**



Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempredikatkan negara-negara yang mendapatkan poin lebih dari 0.75 sebagai Very High (e-Government Development Index) / EGDI, untuk poin 0.50 sampai 0.75 sebagai High EGDI, poin 0.25 sampai 0.50 sebagai Middle EGDI, dan kurang dari 0.25 sebagai Low EGDI. Negara-negara tersebut mendapatkan peringkat untuk 193 negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

The United Nations (UN) predicts countries that score more than 0.75 points as Very High (e-Government Development Index) / EGDI, for points 0.50 to 0.75 as High EGDI, 0.25 to 0.50 points as Middle EGDI, and less than 0.25 as Low EGDI. These countries are ranked for 193 member states of the United Nations (UN).

Terdapat tiga dimensi ukuran kinerja yang ada dalam e-Government Development Index EGDI, antara lain indeks pelayanan daring atau online service index (OSI), indeks infrastruktur telekomunikasi atau telecommunication infrastructure index (TII), dan indeks sumber daya manusia atau human capital index (HCI). Dalam masing-masing penilaian ukuran kinerja tersebut, Indonesia mencatatkan skor yang cukup baik antara lain skor 0.6824 untuk OSI, skor 0.5669 untuk TII, dan skor 0.7342 untuk HCI.

There are three dimensions of performance measures in the EGDI e-Government Development Index, including the online service index (OSI), the telecommunications infrastructure index (TII), and the human capital index (HCI).). In each of these performance measures, Indonesia recorded a fairly good score, including a score of 0.6824 for OSI, a score of 0.5669 for TII, and a score of 0.7342 for HCI.

Ketiga komponen tersebut sudah berada di atas skor rata-rata dunia, meskipun jika dilihat dari grup Regional Asia dan Sub-Regional Asia Tenggara, Indonesia masih berada di bawah rata-rata regional pada skor indeks infrastruktur telekomunikasi (TII). Indonesia juga patut berbangga, karena dalam rilis yang dikeluarkan oleh EGDI, Indonesia berhasil melompat naik 35 peringkat pada e-Participation Index tahun 2020, dari yang sebelumnya peringkat 92 pada tahun 2018, menjadi peringkat 53 pada tahun 2020 dengan skor 0.7500.

Skor ini sudah di atas rata-rata dunia dengan skor 0.5677, di atas rata-rata Regional Asia dengan skor 0.6294, dan juga di atas rata-rata Regional Asia Tenggara dengan skor 0.6126. Hal ini membuat Indonesia naik predikat dari yang sebelumnya termasuk dalam grup High e-Participation Index menjadi grup Very High e-Participation Index.

KESIMPULAN (CONCLUSION)

Indonesia pada Indeks UN e-Government di tahun 2020 berada peringkat 88 dengan skor 0,6612 meningkat 99 level dari tahun 2018 berada pada peringkat 107 skor masing-masing Komponen E-Government Development Index Indonesia:

- a. Indeks Pelayanan Online (0.6824)
- b. Indeks Infrastruktur Telekomunikasi (0.5669)
- c. Indeks Sumber Daya Manusia (0.7342)

Indonesia on the UN e-Government Index in 2020 is ranked 88 with a score of 0.6612, an increase of 99 levels from 2018 which is ranked 107 in the score of each component of the Indonesian E-Government Development Index:

- a. Online Services Index (0.6824)
 - b. Telecommunications Infrastructure Index (0.5669)
 - c. Human Resources Index (0.7342)
2. E-Participation Index Indonesia sudah mencapai 0.75
dengan predikat Very High Participation Index
3. Open Government Data Index Indonesia sudah mencapai
nilai maksimum 100 dengan predikat: Predikat Very High OGD
2. Indonesia's E-Participation Index has reached 0.75 with
the title of Very High Participation Index
3. Indonesia's Open Government Data Index has reached maximum value of
100 with predicate: Very High predicate OGD

REKOMENDASI (RECOMMENDATION)

Untuk menjaring Sumber Daya Manusia yang berkualitas baik dalam mendukung pemerintah dan dunia usaha, khususnya bidang teknologi, pemerintah Indonesia, perlu melibatkan beberapa perguruan tinggi.

To attract good quality Human Resources to support the government and the business world, especially in the technology sector, the Indonesian government needs to involve several universities

Sumber Daya Manusia yang telah bekerja dan menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia perlu diberikan pelatihan dan pembekalan di Civil Service College (CSC).

Perlu menerapkan talent scouting atau pencarian bakat yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah.

Human Resources who have worked and become state civil servants (ASN) in Indonesia need to be given training and debriefing at the Civil Service College (CSC).

Need to implement talent scouting or talent search in accordance with the needs of the government.

